



PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Resti¹

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹Correspondence Email: nurmahrindu71@gmail.com

Received: February 23, 2025

Accepted: June 20, 2025

Published: June 25, 2025

Abstrak

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berimbang kepada peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dengan bangsa lain pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk itu pendidikan wajib diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali masyarakat yang hidup dikota maupun daerah terpencil. adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana langkah dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang? 2) apa saja hambatan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang? adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimana langkah dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang.2) untuk mengetahui apa saja hambatan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di SD Pulau Rinca desa pasir panjang metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. teknik analisa data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sejauh ini belum berjalan dengan efektif karena dilihat dari sarana prasarana, dana bantuan operasional sekolah (Bos) dan keejahteraan guru yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sekolah yang berada di desa pasir panjang sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membantu memecahkan masalah pendidikan yang terjadi didesa pasir panjang.

Keywords: Pemerintah; Pelayanan; Pendidikan; Good Governance

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari setiap kehidupan manusia. salah satu prioritas utama dalam agenda Pembangunan Nasional adalah Pendidikan. oleh karena itu, pemerintah wajib untuk memenuhi setiap hak warga negara dalam mendapatkan layanan Pendidikan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Sama halnya dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang ada pada alenia ke- 4, dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. tidak dapat dihindari bahwa saat ini Pendidikan adalah sesuatu yang menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. walaupun setiap manusia membutuhkan Pendidikan yang tidak sama atau berbeda-beda baik itu jenjang ataupun tempat pendidikannya (Setyasih, 2023).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana setiap orang untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar mengajar agar peserta didik aktif dalam mengembangkan suatu potensinya guna untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta adanya keterampilan yang di peroleh dari dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri (Hermansyah, 2022).

Saat ini suatu Sistem Pendidikan Nasional Indonesia sudah di selenggarakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam penyelenggaraan Pendidikan, selama awal kemerdekaan hingga saat ini. Pemerintah tentunya telah menghadapi banyak masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan Pendidikan di indonesia. banyaknya masalah Pendidikan secara umum di Indonesia antara lain yaitu pemerataan Pendidikan, kualitas Pendidikan, relevansi Pendidikan, efektivitas dan efisiensi Pendidikan. Masalah-masalah ini akan selalu menjadi focus dari Pemerintah itu sendiri dalam suatu cara mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu,

mencerdaskan kehidupan bangsa, Suatu kepedulian pemerintah di daerah terpencil dalam bidang Pendidikan tidak sebesar yang sudah diberikan Pemerintah pada daerah perkantoran yang notabenenya lebih mudah dan gampang dijangkau (Widanti, 2022).

Kepala sekolah merupakan penentu keberhasilan dalam mengelola suatu lembaga pendidikan dan bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan dalam suatu lembaga pendidikan, demikian pula dengan kegiataan pengelolaan sarana dan prasarana. fasilitas dalam lembaga pendidikan yang mencukupi tidak disertai dengan pengelolaan yang baik menjadi permasalahan umum dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut perlu di kelola dengan baik agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal.

Salah satu faktor terciptanya pendidikan bermutu ialah fasilitas sekolah, fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang di adakan untuk memperlancar kegiatan pendidikan di sekolah, dalam usaha memberikan pelayanan proses belajar mengajar yang bermutu maka diperlukan fasilitas sekolah yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, dan dalam pelaksanaanya perlu adanya pengelolaan yang baik. dengan adanya sarana prasarana yang lengkap akan memberikan kepuasaan terhadap siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.

Masalah di atas adalah bentuk masalah yang terjadi di SDN Pulau Rinca, SDI Kerora, dan SD Kukusan yang menjadi permasalahan umum dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. perlu adanya pelayanan yang baik dan maksimal yang di berikan pemerintah kepada sekolah tersebut. Sedangkan untuk jumlah siswa pendidikan sekolah dasar di desa Pasir Panjang pada tahun 2024 adalah sebanyak 234 siswa. Di SDN Pulau Rinca sendiri memiliki jumlah siswa sebanyak 155 siswa dan 15 guru.

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik mencatat, sebanyak 10.985 Desa atau kelurahan tidak ada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Penyebabnya lantaran tidak seimbangnya penyediaan insfratruktur layanan publik yang memadai. Selain belum meratanya pendidikan, kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan dan pedesaan sangat berbeda. di perkotaan, siswa akan mendapatkan pendidikan yang layak dari segi kualitas sarana dan prasarana, berbeda dengan dipedesaan. Mestinya agar pemerataan pendidikan dapat tercapai, paling tidak dalam suatu desa terdapat sd/mi.

Untuk itu, di perlukan perhatian yang serius dari pemerintah, sesuai dengan kewenangan masing- masing agar menyediakan fasilitas pendidikan didaerah terpencil, pegunungan maupun di pesisir, yang mendukung terselenggaranya pemerataan terhadap akses untuk memperoleh pendidikan pemerataan pendidikan tersebut tidak hanya dengan membangun sarana sekolah, yang tidak kalah penting adalah membangun prasarana menuju sekolah.

Sedangkan untuk kondisi geografis dan iklim Kabupaten Manggarai Barat memiliki batas-batas sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan laut flores, bagian selatan dengan laut sawu, bagian barat dengan dengan selat sape, dan bagian timur dengan kabupaten manggarai.

Kabupaten manggarai barat beriklim tropis, seperti halnya di tempat lain di indonesia, di kabupaten manggarai barat dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan juni sampai dengan september arus angin berasal dari australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. sebaliknya pada bulan desember sampai dengan maret arus angin berasal dari asia dan samudera pasifik yang menyebabkan terjadinya musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan april-mei dan oktober-november. Walaupun demikian, mengingat manggarai barat dan NTT umumnya dekat dengan australia arus angin mengandung uap air dari asia dan samudra pasifik sampai di wilayah manggarai barat kandungan airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di manggarai barat lebih sedikit di bandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan asia hal ini menjadikan manggarai barat sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (januari sampai dengan maret dan desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

Dari ke-3 sekolah dasar yang ada di desa pasir panjang tersebut peneliti lebih fokus meneliti pada SDN Pulau Rinca sehingga akan di kaitkan dengan judul yaitu *Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Sdn Pulau Rinca Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo)*.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, kualitatif adalah sebuah proyek penelitian dengan tujuan menentukan fenomena yang dialami oleh orang-orang yang menjadi peserta penelitian, seperti persepsi, perilaku, tindakan dan motivasi (Mahardhani, 2022). Penelitian deskriptif kualitatif menurut Budiman et al., (2022) dalam Rachma Dina Maida Shofa dkk,2022 Penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif lebih menitipberatkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, dan keterkaitan antar kegiatan dari pada penilitian kualitatif. tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendiskripsikan dan mendiskripsikan fenomena yang ada, baik yang alami maupun buatan manusia. Selain itu, penilitian deskriptif tidak memberikan terapi, modifikasi, atau penyesuaian apapun terhadap variable tertentu; sebaliknya, itu hanya melaporkan situasi dalam kondisi saat ini. studi situ sendiri berfungsi sebagai satu-satunya jenis terapi, dan dilakukan melalui kombinasi observasi, wawancara, dan rekaman.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh), sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Salah satu cara untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan atau belum adalah survey kepada para pelanggan hal ini dapat dilakukan ketika masyarakat selesai bertransaksi atau sebelum mereka keluar dari kantor dinas selanjutnya dapat diketahui apa saja yang sudah bagus dan perlu dipertahankan serta sisi apa saja yang masih perlu dikembangkan lagi di lihat dari sisi pola pelaksanaan, pelayanan pendidikan memiliki berbagai kelemahan hambatan geografis misalnya jauhnya lokasi sekolah yang diikuti oleh tidak adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai sekolah, mahalnya biaya pendidikan terutama pada pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi.

Tabel 1. Jenis Pelayanan Kegiatan Tahun 2024

NO	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Perbulan
1.	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Januari
2.	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Februari
3.	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Maret
4.	Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	April
5.	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Mei
6.	Penyadaran,pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota wirausaha muda pemula,dan pemuda kader kabupaten/kota	Juni
7.	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	Juli
8.	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Agustus
9.	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	September

Sumber Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Dari tabel diatas dapa dilihat kegiatan/ pelayanan yang diberikan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga di kabupaten manggarai barat tahun 2024 dan berdasarkan jadwal kegiatannya. Dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga kabupaten manggarai barat memiliki kegiatan berdasarkan bidang yaitu secretariat, bidang pendidikan dan pengajaran, bidang guru dan tenaga kependidikan , bidang PAUD dan PNFI Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana lebih mengoptimalkan agar peserta didik memilki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatkan kompetensi diri menindaklanjuti hal ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat malalui Bidang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan PNF (Pendidikan Non Formal) melaksanakan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka (IKM) pada lembaga pendidikan non formal di Aula SMK stella maris, Labuan bajo pada selasa, 21 maret 2024. kegiatan ini diikuti oleh seluruh lembaga PNF sekabupaten manggarai barat kegiatan IKM untuk pendidikan kesetaraan di selenggarakan sebagai bentuk sinergis anatara bidang bidang pendidikan non formal (PNF) Dinas PKO dengan lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (FK PKBM) di kabupaten manggarai barat.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten manggarai barat, Drs. Yohanes Hani, M.pd dan diikuti oleh unsur operator dan tutor satuan pendidikan kesetaraan yaitu 13 peserta dari PKBM dan SKB yang ada di wilayah kabupaten manggarai barat. dalam sambutannya, Yohanes Hani memberi motivasi para pengelola atau direktur PKBM agar serius dalam memajukan pendidikan manggrai barat khususnya dalam hal pendidikan kesetaraan saat ini kita sedang berusaha kaji dan focus pada anak-anak yang putus sekolah baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. yang tidak tamat/putus waktu SMP dan tidak tamat/putus SMA, kita arahkan ke SKB atau PKBM apakah kita menunggu orang yang mendaftar atau kita harus mencari siswa yang putus sekolah? PKBM mesti menjadi perpanjangan tangan dinas PKO dalam upaya pendataan sekaligus

menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tutur John Hani.

Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten manggarai barat, Drs.Yohanes Hani, M.pd. berpesan agar menghilangkan kesan ketidakserusan dalam mengelola PKBM “ Pendidikan non formal itu, terkesan ada dan tidak. ada nama kelompoknyaanya, namun siswanya tidak ada. maksudnya siswa ada saat mau ujian tugas di rektur PKMB menggerakkan/menghidupkan PKBM. karena pendidikan kesetaraan adalah salah standar pelayanan minimal(SPM) saat ini aturannya tidak segampang dulu. saat ini mesti ada data lengkap, by name by address, semua berbasis depodik perkuat cabang-cabang PKBM kita mesti bersemangat dan bergerak serius” tegas kadis PKO.

Hal lain yang mau di sampaikan kepala dinas PKO manggarai barat adalah berkaitan pentingnya akreditasi PKBM diakreditasi syaratnya mesti ada program paket, dokumen kurikulum, guru, ijin operasional dan lain-lain. jangan berkecil hati karena bergerak dipendidikan pendidikan non formal. semua sama karna bergerak di dunia pendidikan” ujar salah satu asesor pendidikan non formal ini adapun syarat umum yang harus di penuhi PKBM dalam pengajuan akreditasi anataralain, memiliki ijin penyelenggaraan, mengajukan akta pendirian dari notares, telah beroperasi minimal dua tahun, memiliki nomor pokok satuan PAUD (NPSP) bagi PAUD mempunyai nomor induk lembaga kursus dan pelatihan, dan nomor induk lembaga bagi PKBM juga menggunakan prasarana pendukung dengan dokumen yang sah (sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan dan surat perjanjian pemanfaatan prasarana).

Pembahasan

Setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan dan berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kehidupan yang layak ini dengan amanat dari UUD 1945 berkaitan dengan pelayanan ada dua istilah yang perlu diketahui yaitu melayani dan pelayanan pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (KBBI).

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan professional. Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar, seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat, pemerintah modern dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan potensi kependidikan secara optimal ada baiknya dinas pendidikan mengontrol peningkatan potensi kependidikan agar siswa yang tidak mampu dan putus sekolah namun berprsetasi diberikan kesempatan untuk menikmati pendidikan karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pelayanan publik bidang pendidikan dasar dalam perspektif good governance, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat atau keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan dengan adanya keterlibatan masyarakat para pihak dapat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan fungsi control dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat dibutuhkan kesadaran dan

pengetahuan kepada masyarakat mengenai seperti apa peran masyarakat didalam pelayanan publik

2. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik pendidikan dasar sejauh ini belum berjalan dengan efektif karena dilihat dari sarana prasarana, dana bantuan operasional sekolah (bos) yang belum memadai
3. Meningkatkan mutu pendidikan, akses penduduk yang lebih terbuka keberbagai fasilitas pendidikan, tingkat kesejahteraan yang cukup memadai dan ditunjang oleh lingkungan hidup yang sangat dipengaruhi kebudayaan urban telah menjadikan penduduk desa pasir panjang mempunyai aspirasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
4. Kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan pemerintah daerah yang menjadi hambatan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Desa Pasir Panjang
5. Sarana dan Prasarana, dana bantuan operasional (bos) dan kesejahteraan guru yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah
6. Peningkatan pelayanan pendidikan di Desa Pasir Panjang dan peningkatan pelayanan antara SD Kerora dan SD Pulau Rinca, lebih meningkat di SD Pulau Rinca karena bantuan dari BUMN yang merehab seluruh bangunan sekolah sedangkan SD kerora masih sebagian

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan masyarakat para pihak dapat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan fungsi control dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan pelayanan yang baik.
2. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan lagi pelayanan publik

-
- pendidikan dasar didesa pasir panjang agar lebih efektif
3. Meningkatkan mutu pendidikan, akses penduduk yang lebih terbuka keberbagai fasilitas pendidikan, tingkat kesejahteraan yang cukup memadai agar pelayanan pendidikan berjalan dengan semestinya
 4. Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan administrasi pendidikan di daerah kepulauan sehingga pemerataan pendidikan dapat terlaksana dengan baik
 5. Meningkatkan dana bantuan untuk sekolah dasar didesa pasir panjang khususnya SD kerora yang jauh tertinggal dengan SD Pulau Rinca.
 6. Kepala sekolah didesa pasir panjang harus lebih aktif dalam mengawali pembangunan disekolah dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar pemerataan pendidikan dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance. In *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* (Vol. 1, Issue 1, p. 43). [digilibadmin.unismuh.ac.id.
https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671](http://digilibadmin.unismuh.ac.id.https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671)
- Brendiko, B. (2022). *Pelaksanaan prinsip good governance di kelurahan Cikiwul kota Bekasi Jawa barat.* [repository.unismabekasi.ac.id.
http://repository.unismabekasi.ac.id/id/eprint/431](http://repository.unismabekasi.ac.id/id/eprint/431)
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i1.26209>
- Hamirul, & Alamsyahril. (2020). *Good Governance: Dalam Perseptif Kualitas*

- Pelayanan Publik (p. ^{Besti} 30). Pustaka Learning Center.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IAM9EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA33&dq=pelayanan+publik&ots=vzuo1JYGkX&sig=XAwuYBRW0OLFCoCbVNWnh2uIEFA>
- Hermansyah, H. (2022). Penerapan Otonomi Daerah Pada Sektor Pelayanan Dan Prinsip Good Governance. *Acta Law Journal*, 1(1).
<https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.9825>
- Kurniawan, C., Pratama, I., Purnawingsih, T., Artificial, U. P.-I. J. of, & 2022, U. (2022). Measuring Smart City Implementation to Improve the Quality of Public Services in Jambi City. *Ijair.Id*, 0(1).
<https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.405>
- Kurniawan, C., & Suswanta, S. (2022). Implementation of Artificial Intelligence by the Government of West Nusa Tenggara (NTB) in Disaster Management. *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)*, 209(Iconpo 2021), 39–44.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269.
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.649>
- Mahardhani, A. J. (2022). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 137–155. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i2.3522>
- Nurmandi, A., Muhammad Lutfi, Sumardi, & Zuly Qodir. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*, 1(1), 49–61.
<https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.253>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi birokrasi dan tantangan implementasi good

governance di indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62.

<https://www.ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/view/67>

1

Simarmata, N. Y., & Sutrisno, E. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. ... *Dan Administrasi Publik*. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/550%0Ahttps://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/download/550/378>

Sinaga, K. (2021). Evaluasi {Pelayanan} {Publik} {Dalam} {Perspektif} {Pengembangan} {Wilayah} di {Kota} {Medan}. *Publik Reform*, 8(1), 69–78.
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/1473%0Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/download/1473/1280>

Subagyo, I., Suluh, D., & Dewi, K. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Post Covid-19 Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan JISIP*, 6(3), 2598–9944.
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3384>

Tabo, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., Rifdan, R., & Makmur, M. A. (2022). Penataan Kelembagaan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Skb Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 64–74.
<https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.273>

Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*, 108–112.
<https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.50>

Utami, T. S. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Selama Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Clean and Good Governance Di Kota Semarang. In *Jurnal JURISTIC* (Vol. 2, Issue 01, p. 31). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2047>

- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep ^{Resti} Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Widayat, R. M., Aji, J. S., & Kurniawan, C. (2023). A Systematic Review of Social Media and Government in the Social Science Discipline. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(1), 59–74. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.100>
- Wulandari, A., & Zubaedah, I. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(February 2022). <http://ejurnal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/6%0Ahttp://ejurnal-jayabaya.id/Perspektif/article/download/6/6>
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. In *Law Jurnal* (Vol. 1, Issue 1, pp. 32–42). [jurnal.dharmawangsa.ac.id.](https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786) <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>
- Ali, Muhammad. 2006. "Kebijakan Publik" Pn. GentaPres. Yogyakarta.
- Alpusari, Mahmud. 2013. "Analisis Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah Dasar Pekanbaru" di unduh melalui <https://www.google.com>. (16/11/24).
- Damanik, Apri. 2011. "Eksitensi Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Simulungun pasca perpindahan ibu kota kabupaten simulungun dari pemantang siatar ke pemantang raya" di unduh melalui <http://lib.unnes.ac.id>. (16/04/24).
- Hasibuan, Abdulrrozzaq. 2017. "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas pendidikan di provinsi Sumatera Utara". Diunduh melalui <https://www.google.com>. (25/04/24).
- Drs. Yohanes Hani M.Pd., (Kepala Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga) pada hari kamis, 19-20 april 2024 jam 09:00 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Manggarai Barat.

-
- Imran, Muh. 2014. "Pendidikan Masyarakat Terpencil di dusun Tompu desa Loru kecamatan sigi Biromaru". Diunduh melalui <http://jurnal.untad.ac.id>. (25/04/24).
- Kalismaya, Irvanda. 2017. "Aspirasi Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil desa bugelan kismantoro wonogiri". Diunduh melalui <https://www.google.com>. (25/04/24).
- Kementerian Pendayanaan Aparatur Negara Dan Revormasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Public
- Kurniadin, Machali. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Yokyakarta: Ar-ruzz Media.
- Misya, Viqy. 2017. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014". Diunduh melalui <http://www.google.com>. (25/04/24).
- Mudyaharjo, Redja. 2001. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Muhammad Tayeb, S.Pdi (kepala sekolah SD Pulau Rinca) pada hari senin, 21 april 2024 jam 09:00 di SD Pulau Rinca
- Nuryani, Khoirina. 2014. "Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Sd Unggulan Muhammadiyah Kretekter Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014" di unduh melalui <http://ejournal.unri.ac.id>. (20/04/24).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penglolaan Dan Penyelenggraan Pendidikan
- Eti Rahmawati, S.Pd (kepala sekolah SD kerora) pada hari senin, 25 april 2024 jam 13:00 di SD kerora
- Sadulloh, Uyo. 2018. *Pengantar Ilmu Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bogong, Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Torro, Supriadi, Zainal. 2016. "Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten^{Resti} Mamasa Sulawesi barat". Diunduh melalui <http://ojs.unm.ac.id>. (27/4/24).